

Siaran Pers

ANUGERAH KOPERASI PENGGERAK PEMBANGUNAN UNTUK MENDORONG PERAN KOPERASI DALAM MEMBANGUN INDONESIA

Jakarta (31/7) – Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Koperasi ke-70 yang telah dilaksanakan di Makassar, 12 Juli 2017 lalu, Kementerian PPN/Bappenas memberikan anugerah **Koperasi Penggerak Pembangunan** kepada koperasi yang berhasil memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia di Gedung Bappenas, Senin (31/7) pagi. Penghargaan tersebut merupakan wujud perhatian bagi para insan koperasi agar dapat meningkatkan peran yang lebih besar lagi bagi pembangunan nasional. Saat ini, kontribusi koperasi terhadap pembangunan, khususnya terhadap produk domestik bruto, masih relatif kecil, yaitu sekitar empat persen. “Namun, saya yakin pengelolaan koperasi yang lebih profesional di masa depan akan meningkatkan kontribusi koperasi pada pembangunan,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Kinerja dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan tingkat yang relatif baik, terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2017 yang mencapai 5,01 persen dan pada 2016 sebesar 5,02 persen. Ada empat sektor utama yang berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu industri, pertanian, perdagangan dan konstruksi. Pada 2018, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,0 persen. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi berpotensi untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional di masa yang akan datang. Dalam empat tahun terakhir, perkembangan koperasi telah menunjukkan arah yang positif. Tercatat, pertumbuhan jumlah koperasi aktif rata-rata sebesar 2,5 persen pada periode 2012-2016.

Pemerintah juga telah mengupayakan berbagai program untuk mengembangkan koperasi, di antaranya program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, program peningkatan daya saing usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi, serta program penguatan kelembagaan koperasi. Hingga 5 Juli 2017, Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi yang terdiri atas koperasi konsumen sebanyak 97.931 unit (64,31 persen), koperasi produsen sebesar 27.871 unit (18,30 persen), koperasi simpan pinjam sebanyak 19.509 unit (12,81 persen), koperasi jasa sejumlah 3.661 unit (2,40 persen), dan koperasi pemasaran sebanyak 3.310 unit (2,17 persen). Volume usaha koperasi tercatat sebesar 176,3 triliun rupiah dan sisa hasil usaha senilai 6,2 triliun rupiah. Dilihat dari data distribusi wilayah koperasi, jumlah koperasi terbesar masih berpusat di Jawa sebanyak 76.971 koperasi dan Sumatera sebanyak 30.478. “Data tersebut menjadi perhatian kita, untuk memberikan peluang berkembangnya koperasi di pulau lainnya di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan distribusi jumlah koperasi,” tegas Menteri Bambang.

Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat koperasi agar semakin berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan enam cara utama. *Pertama*, penguatan edukasi agar anggota memahami hak dan kewajiban sehingga mampu mendorong keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. *Kedua*, pendidikan kepemimpinan sehingga setiap anggota belajar dan diberi kesempatan untuk mengelola koperasi. *Ketiga*, pengenalan kewirausahaan agar pengurus dan anggota mampu mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan dinamika kebutuhan. *Keempat*, peningkatan kepedulian sosial sehingga koperasi mampu menjalankan tanggung jawab sosial untuk mendukung aktivitas anggota dan perbaikan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. *Kelima*, implementasi kolaborasi agar koperasi menggalakkan kerja sama antar anggota, serta dengan lembaga pendidikan yang menaungi koperasi dan mitra kegiatan lainnya. *Keenam*, peningkatan inovasi agar koperasi memiliki kapasitas untuk berkreasi dengan melibatkan kontribusi seluruh anggota.

Kementerian PPN/Bappenas turut mengapresiasi peran Kementerian Koperasi dan UKM yang terus berupaya memberikan penyuluhan dan pendampingan perkoperasian, memfasilitasi akta pendirian koperasi, menata administrasi badan hukum koperasi, meningkatkan skala usaha koperasi, dan memodernisasi usaha koperasi di sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Dalam pembangunan nasional, koperasi diarahkan sebagai penggerak pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, di antaranya melalui peningkatan kontribusi ekspor koperasi dalam ekspor nasional, partisipasi koperasi dalam pembangunan infrastruktur nasional, peran koperasi dalam layanan keuangan, peran koperasi dalam sektor pariwisata, peran koperasi dalam rantai produksi global, serta sinergi koperasi dengan badan usaha milik desa. “Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, saya berharap koperasi dapat untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan,” tutup Menteri Bambang.

Berikut daftar **Peraih Anugerah Koperasi Penggerak Pembangunan:**

Kategori Koperasi Berorientasi Ekspor

Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat
Koperasi Serba Usaha Jatirogo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kategori Koperasi Membangun Infrastruktur

Koperasi Warga Semen Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Koperasi Telekomunikasi Selular, Provinsi DKI Jakarta

Kategori Koperasi Simpan Pinjam Dengan Pengelolaan Profesional

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Koperasi Kredit Obor Mas, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Penghargaan Khusus bagi Koperasi Sekunder yang Berkontribusi dalam Percepatan Pembangunan

Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur

Jakarta, 31 Juli 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id